

# PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN CIANJUR MENURUT PENGELUARAN

## 2017-2021



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN CIANJUR**

# PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN CIANJUR MENURUT PENGELUARAN

## 2017-2021



# **PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN CIANJUR MENURUT PENGELUARAN 2017-2021**

ISSN :  
NOMOR PUBLIKASI : 32030.2203  
KATALOG : 9302021.3203

UKURAN BUKU : 17,6 cm x 25 cm  
JUMLAH HALAMAN : xi + 72 halaman

**Naskah :**

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

**Penyunting:**

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

**Desain Kover :**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur

**Diterbitkan oleh:**

© Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur

**Dicetak oleh:**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Tim Penyusun

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO  
KABUPATEN CIANJUR  
MENURUT PENGELUARAN 2017-2021**

Penanggung Jawab Umum :  
Dani Jaclani, S.Si.,M.T

Penanggung Jawab Teknis :  
Warji Permana, SE

Editor :  
Warji Permana, SE

Penulis dan Pengolahan Data :  
Warji Permana, SE  
Bayu Bastian Jumena, S.ST  
Ani Saebani, S.Si

Desain/Lay out :  
Bayu Bastian Jumena, S.ST

## KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi di suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten /kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dengan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengemabangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto Dan Perubahan Inventori), dan Net Ekspor/Impor. Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya telah menggunkan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System Of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerja sama yang telah terjalin dapat terus berlanjut serta ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Terakhir, disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Cianjur, April 2021

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN CIANJUR



**DANI Jaelani, S.Si, M.T.**



# DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GRAFIK	xi
DAFTAR TABEL LAMPIRAN	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	3
1.2 Perubahan Tahun Dasar PDRB	7
BAB II. METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA	13
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT)	15
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT)	17
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P)	19
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	23
2.5 Perubahan Inventori (PI)	25
2.6 Ekspor Impor	29
BAB III. TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN CIANJUR MENURUT PDRB PENGELUARAN TAHUN 2017-2021	31
3.1 Perkembangan PDRB Pengeluaran	33
3.2 Perkembangan Komponen PDRB Pengeluaran	41
3.2.1 Konsumsi Akhir Rumahtangga	41
3.2.2 Konsumsi Akhir LNPRT	45
3.2.3 Konsumsi Akhir Pemerintah	47
3.2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	49
3.2.5 Perubahan Inventori	51
3.2.6 Net Ekspor Barang dan Jasa	52

BAB IV. PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN CIANJUR 2017-2021	55
4.1 PDRB (Nominal)	57
4.2 Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap PMTB	58
4.3 Proporsi Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB	59
BAB V. PENUTUP	61
LAMPIRAN	62
DAFTAR PUSTAKA	

<https://cianjurkab.bps.go.id>

## DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Cianjur, Tahun 2017-2021	34
Tabel 2.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Cianjur, Tahun 2017-2021	35
Tabel 3.	Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Cianjur, Tahun 2017-2021	37
Tabel 4.	Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Cianjur, Tahun 2017-2021	38
Tabel 5.	Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Cianjur, Tahun 2017-2021	40
Tabel 6.	Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Cianjur, Tahun 2017-2021	40
Tabel 7.	Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Cianjur, Tahun 2017-2021	43
Tabel 8.	Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Cianjur, Tahun 2017-2021	44
Tabel 9.	Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Cianjur, Tahun 2017-2021	45

Tabel 10.	Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT Kabupaten Cianjur, Tahun 2017-2021	46
Tabel 11.	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Cianjur, Tahun 2017-2021	48
Tabel 12.	Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Cianjur, Tahun 2017-2021	50
Tabel 13.	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Cianjur, Tahun 2017-2021	51
Tabel 14.	Perkembangan dan Struktur Perubahan Net Ekspor Kabupaten Cianjur, Tahun 2017-2021	53
Tabel 15.	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Cianjur, Tahun 2017-2021	57
Tabel 16.	Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB, Kabupaten Cianjur, Tahun 2017-2021	59
Tabel 17.	Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Cianjur, Tahun 2017-2021	60

## DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 1.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Cianjur, Tahun 2017-2021	34
Grafik 2.	PDRB atas dasar harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Cianjur, Tahun 2017-2021	36
Grafik 3.	Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Cianjur, Tahun 2017-2021	36
Grafik 4.	Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Cianjur, Tahun 2017-2021	38
Grafik 5.	Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Cianjur, Tahun 2017-2021	39

## DAFTAR TABEL LAMPIRAN

		Halaman
Tabel 1.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Cianjur Tahun 2017-2021	62
Tabel 2.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Cianjur Tahun 2017-2021	63
Tabel 3.	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Seri Menurut Pengeluaran Kabupaten Cianjur Tahun 2017-2021	64
Tabel 4.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Seri Menurut Pengeluaran Kabupaten Cianjur Tahun 2017-2021 (persen)	65
Tabel 5.	Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Kabupaten Cianjur (2010=100), Tahun 2017-2021	66
Tabel 6.	Laju Pertumbuhan Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Kabupaten Cianjur (2010=100), Tahun 2017-2021 (persen)	67

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

<https://cianjurkab.bps.go.id>



## 1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel Pengeluaran Konsumsi Akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). Sungguhpun demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)<sup>1</sup>. Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa.

---

<sup>1</sup> Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung “neto” (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)

Secara konsep<sup>2</sup> penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi; ii) memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*). Namun karena pendekatan estimasi dan metoda pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical discrepancy*).

Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”. Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

---

<sup>2</sup> *Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)*

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metoda dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para pengguna data PDRB tidak mempermasalahkan adanya perbedaan (*statistical discrepancy*) tersebut.

Penyusunan data **PDRB Pengeluaran** juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana “pendapatan” (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat<sup>3</sup>, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai “**output akhir (final output)**”. Mengkaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan *Keynesian* sbb :

---

3. - Yang dimaksud adalah rumahtangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik  
- Disebut sebagai pendekatan “riil”  
- Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut

$$Y = C + \text{GFCF} + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

Y ( <i>Income</i> )	= PDRB Produksi
C ( <i>Consumption</i> )	= Konsumsi akhir
GFCF ( <i>Gross Fixed Capital Formation</i> )	= Pembentukan Modal Tetap Bruto
$\Delta$ Inventori	= Perubahan Inventori
X	= Ekspor
M	= Impor

Persamaan di atas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan “identik” dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF serta  $\Delta$  Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai “ekspor neto” .

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat tentang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan “riil”, serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

## 1.2 PERUBAHAN TAHUN DASAR PDRB

### Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts* (SNA) adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables* (SUT) Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten Cianjur menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

### Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomian wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

### **Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?**

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

- a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kualitas PDRB;
- c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

### **Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?**

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- a. Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;
- b. Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- c. Perubahan input data untuk keperluan *modeling* dan *forecasting*.

### **Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?**

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sbb:

- Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;

- Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun<sup>4</sup>;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA 2008;
- Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);
- Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

### Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

- Konsep dan Cakupan
  - a. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). CBR merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contoh nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.
  - b. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). MWS merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri

<sup>4</sup> SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"

- peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.
- c. Penelitian dan pengembangan (*research and development/RnD*). *RnD* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti *RnD* tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.
  - d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). *MEE* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
  - e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
  - f. Komputer software (*computer software and databases/CSD*). *CSD* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan *databases*, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
  - g. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). *ELA* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
  - h. pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.

- Metodologi

Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metoda FISIM (*Financial intermediation services indirectly measured/FISIM*). FISIM dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metoda ini menggantikan metoda *Imputed Bank Services Charge (IBSC)*.

- Valuasi

Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

- Klasifikasi

Klasifikasi yang digunakan adalah Internasional Standard Industrial Classification (ISIC rev.4) dan Central Product Classification (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

**Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010**

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4. Perubahan Inventori	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5. Ekspor	5. Perubahan Inventori
6. Impor	6. Ekspor
	7. Impor

**BAB II**  
**METODE ESTIMASI**  
**DAN**  
**SUMBER DATA**

<https://cianjurkab.bps.go.id>



## 2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA (PK-RT)

### i. Pendahuluan

Sektor rumahtangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumahtangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran<sup>1</sup>. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya.

### ii. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga untuk tujuan konsumsi. Rumahtangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

### iii. Cakupan

PK-RT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut *Classifications of Individual Consumption by Purpose (COICOP)*, sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin

<sup>1</sup> Untuk Kabupaten yang mempunyai hasil tambang/industri/perkebunan dan nilai eksportnya sangat tinggi, umumnya nilai konsumsi rumahtangganya relatif lebih rendah

6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun dalam publikasi ini, PK-RT hanya diklasifikasi ke dalam 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Peralengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

#### **iv. Sumber Data**

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional/Daerah (Susenas/Suseda), BPS
- Survei Khusus Konsumsi Rumah tangga Triwulanan (SKKRT), BPS
- Sensus Penduduk 2010, BPS
- Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)
- Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS

#### **v. Metoda Estimasi**

Komponen PK-RT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi perkapita Susenas/Suseda (untuk PK-RT Tahunan)
2. Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12 (PKRT Tahunan)
3. Data poin 2 dikelompokkan menjadi 12 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri;
4. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai;
5. Diperoleh nilai PK-RT Tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku) ;
6. Susun Indeks implisit PK-RT berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat);
7. Nilai PK-RT atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

Catatan:

Komponen PK-RT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan konsumsi rumahtangga triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SKKRT.

## **2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAH TANGGA (PK-LNPRT)**

### **i Pendahuluan**

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumahtangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumahtangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan di bawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

## ii Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumahtangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

## iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis dan barang cetakan; pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan; biaya transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas; belanja barang dan jasa lainnya; sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lain
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

## iv. Sumber Data

- Survei Khusus Lembaga Nonprofit yang melayani Rumahtangga (SK-LNP), BPS

- SK-LNP Triwulanan (SK-LNPT), BPS
- Hasil *up-dating* direktori LNPRT, BPS
- Indeks Harga Konsumen, BPS

#### v. **Metoda Estimasi**

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP;
2. Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT;
3. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-LNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai even seperti munas, rakerda, dan penanganan bencana;
4. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku);
5. Susun Indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. Nilai PK-LNPRT atas dasar harga Konstan (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

Catatan :

Komponen PK-LNPRT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi LNPRT triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SK-LNPT.

## **2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PK-P)**

### **i. Pendahuluan**

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif

atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumah tangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

## ii. Konsep dan Definisi

Nilai PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri. Nilai tersebut diestimasi dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesar nilai pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai output dari unit Bank Indonesia. Nilai ini masih harus dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang tak terpisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Aktivitas yang dimaksud mencakup aktivitas:

1. Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan pembibitan tanaman di kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barang semacam itu bersifat insidental dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam

parktek, pemerintah akan memungut biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihi seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi atau pendapatan jasa.

### **iii. Cakupan**

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah kabupaten mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

PK-P kabupaten mencakup: a). PK-P desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten/kota; b). PK-P kabupaten yang bersangkutan; c). PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-P kabupaten/kota.

### **iv. Sumber Data**

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P kabupaten tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBD Tahunan, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- b. Statistik Keuangan Daerah, BPS
- c. Output Bank Indonesia, Bank Indonesia
- d. Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- e. Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS
- f. Indeks perkembangan pengeluaran pemerintah daerah triwulanan, BPS

### **v. Metoda Estimasi**

Komponen PK-P Kabupaten Cianjur Tahunan diestimasi dengan menggunakan metoda:

$$\text{PK-P atas dasar harga Berlaku} = \text{Output} - \text{Penjualan barang dan jasa} + \text{Social transfer in kind purchased market production} + \text{Output Bank Indonesia}$$

Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Catatan :

1. Komponen PK-P Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi pemerintah daerah triwulanan
2. PK-P atas dasar harga Konstan diestimasi dengan men-deflate PK-P atas dasar harga Berlaku dengan menggunakan deflator berikut:

Jenis Belanja	Deflator	Keterangan
Belanja Pegawai	Indeks Upah	Sama dengan Nasional
Belanja Barang	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penyusutan	Indeks Implisit PMTB	
Belanja Bansos	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penerimaan barang dan jasa	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Social Transfer in kind	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Output BI		Neraca Jasa

## 2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

### i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investas yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

### ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya (*Cultivated Biological Resources/CBR*). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

### iii Cakupan

PMTB mencakup :

1. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidayakan (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*);
2. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi.

### iv Sumber Data

- a. Output industri konstruksi, BPS
- b. Nilai impor 2 digit HS, BPS
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS
- d. Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS
- f. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas), BPS
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum, BPS
- i. Publikasi Statistik Konstruksi, BPS
- j. Data Eksplorasi Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.

### v Metoda estimasi

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metoda langsung

ataupun metoda tidak langsung tergantung ketersediaan data di masing-masing daerah.

✓ Metoda Langsung:

PMTB atas dasar harga Berlaku (Domestik) = Barang Modal Domestik + TTM + Pajak atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Berlaku (Impor) = Barang Modal Impor + TTM + Bea Impor + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara men-*deflate* PMTB atas dasar harga Berlaku dengan IHPB sbb:

$$PMTB_{ADHK} = \frac{PMTB_{ADHB}}{IHPB}$$

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.

✓ Metoda Tidak Langsung:

Pendekatan Supply : PMTB atas dasar harga Berlaku = Total Supply Barang x Rasio PMTB

Pendekatan Ekstrapolasi : PMTB atas dasar harga Konstan (t) = PMTB atas dasar harga (t-1) x Indeks Produksi (t)

## 2.5 PERUBAHAN INVENTORI (PI)

### i Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, disamping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan

data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

## ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng dan gula pasir perlu dicadangkan oleh pemerintah. Namun bagi rumahtangga, pengadaan inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

### iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Inventori menurut jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; serta
- h. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

### iv Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori adalah :

- Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau *website* Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id));
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD, Data Sekunder dari luar BPS
- Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalian BPS;

- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang, BPS;
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
- Data persediaan beras, Bulog; data semen, Asosiasi Semen Indonesia; data gula, Dewan Gula Indonesia ; dan data ternak, Ditjennak Kementan.

## v **Metoda Estimasi**

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan metoda revaluasi atau metoda deflasi, tergantung jenis komoditasnya.

### a. Metoda Revaluasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan.

PI atas dasar harga Berlaku = Volume nventori (t) - Volume inventori (t-1) x Harga per unit

PI atas dasar harga Konstan = PI atas dasar harga Berlaku / IHPB

### b. Metoda Deflasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

PI atas dasar harga Konstan = Inventori (t) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t) - Inventori (t-1) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t-1)

PI atas dasar harga Berlaku = PI atas dasar harga Konstan x IHPB rata-rata (t)

### i Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestiknya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah.

### ii Konsep dan definisi

Ekspor-impor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/ pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

### iii Cakupan

Ekspor-Import ke dan dari suatu wilayah Kabupaten terdiri dari:

- a. Ekspor ke luar provinsi/Kabupaten
- b. Import dari luar provinsi/kabupaten/kota.

Selisih antara ekspor dan impor didefinisikan sebagai Net Ekspor.

#### iv Sumber Data

Nilai ekspor-impor wilayah Kabupaten Cianjur didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun sering kali untuk mengestimasi tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor Kabupaten Cianjur diperlakukan sebagai item penyeimbang (*residual*), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya dilakukan pemisahan Net Ekspor menjadi ekspor dan impor dengan menggunakan metoda tidak langsung.

<https://cianjurkab.bps.go.id>

## ***BAB III***

# ***TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN CIANJUR MENURUT PDRB PENGELUARAN TAHUN 2017 -2021***

<https://cianjurkab.bps.go.id>



### 3.1 PERKEMBANGAN PDRB PENGELUARAN

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2015, PDRB diestimasi dengan menggunakan tahun dasar yang baru, yaitu tahun 2010 (2010=100) menggantikan tahun dasar lama, tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan *System of National Accounts (SNA)* yang baru, SNA 2008. Ke dua hal tersebut tentu berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDB/PDRB tersebut.

Secara total, PDRB Kabupaten Cianjur atas dasar harga Berlaku di tahun 2021 meningkat sebesar 5,58%, yakni dari 47.528,97 miliar Rupiah di 2020 menjadi 50.137,65 miliar Rupiah. Sama halnya jika dinilai atas dasar harga Konstan 2010, maka terjadi peningkatan sebesar 1.106.758,6 miliar Rupiah di tahun 2021 dibanding tahun sebelumnya, hingga menjadi 32.897,51 miliar Rupiah (2010=100), atau meningkat sebesar 3,48%.

Di tahun 2021 ekonomi mulai menunjukkan perbaikan setelah sebelumnya berkontraksi akibat pandemi covid-19. Perekonomian Kabupaten Cianjur di tahun 2021 mengalami pertumbuhan positif sebesar 3,48 persen. Selama periode empat tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cianjur tumbuh sebesar 5,77 persen (2017); 6,24 persen (2018); 5,67 persen (2019) dan -0,78 persen (2020). Peningkatan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*). Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2021 terjadi pada kategori Real Estate yang selalu tumbuh di atas 10 persen. Dari sisi permintaan akhir, pertumbuhan komponen Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga (PK-RT), tampak stabil di kisaran nilai 2 hingga 5 persen setiap tahunnya, kecuali di tahun 2020 yang mengalami kontraksi.

Pada periode tahun 2017-2021 PDRB Kabupaten Cianjur atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan, yakni 38.575,00 miliar Rupiah (2017);

42.971,24 miliar Rupiah (2018) 46.957,85 miliar Rupiah (2019), 47.528,97 (2020) dan 50.137,65 (2021). Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. Peningkatan PDRB menurut komponen pengeluaran Kabupaten Cianjur pada periode 2017-2021 dapat dilihat dari tabel 1 dan grafik 1 berikut ini:.

**Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Cianjur Tahun 2017-2021**

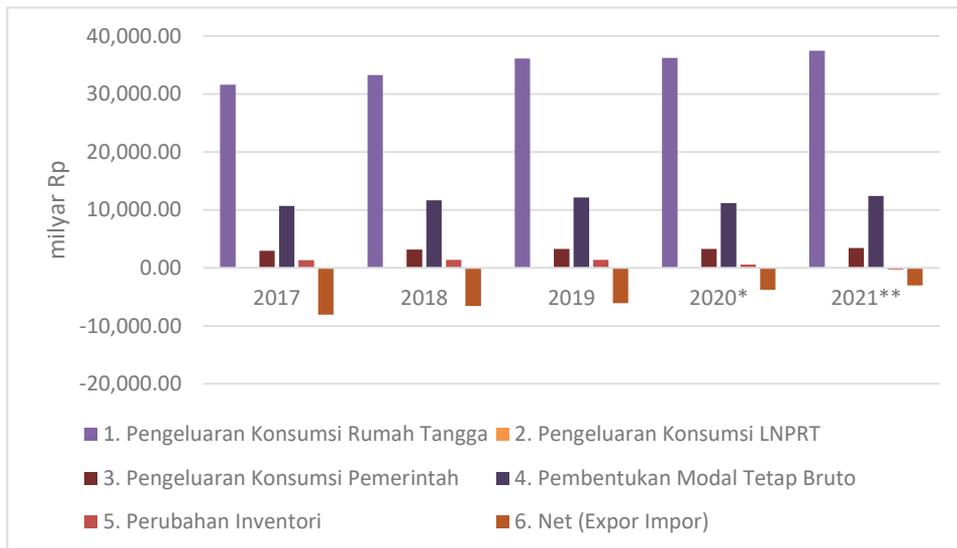
(Miliar Rp)

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	31.607,52	33.280,74	36.111,19	36.226,78	37.476,11
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	86,01	106,83	114,40	111,84	115,46
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.956,90	3.160,55	3.280,70	3.276,76	3.445,38
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	10.674,53	11.637,13	12.114,61	11.143,62	12.410,21
5. Perubahan Inventori	1.313,07	1.381,79	1.406,89	557,24	-278,12
6. Net (Expor Impor)	-8.063,03	-6.595,80	-6.069,94	-3.787,27	-3.031,39
<b>TOTAL PDRB</b>	<b>38.575,00</b>	<b>42.971,25</b>	<b>46.957,85</b>	<b>47.529,0</b>	<b>50.137,7</b>

\*Angka Sementara

\*\*Angka sangat sementara

**Grafik 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Cianjur Tahun 2017-2021**



Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang direvaluasi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDB atas dasar harga Konstan 2010 Kabupaten Cianjur pada periode 2017-2021 dapat dilihat dari tabel 2 dan grafik 2 berikut ini.

**Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Cianjur Tahun 2017-2021**

(Miliar Rp)

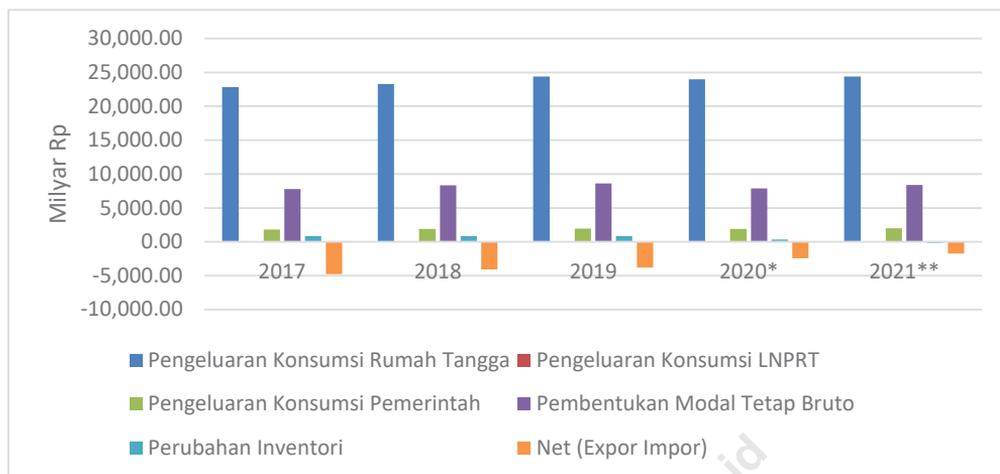
Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	22.800,30	23.273,51	24.379,02	23.975,67	24.369,71
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	65,09	75,25	77,91	75,08	76,55
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.807,94	1.886,35	1.946,24	1.914,72	1.970,20
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	7.785,15	8.318,08	8.594,51	7.891,46	8.388,23
5. Perubahan Inventori	851,93	860,42	862,24	339,80	-159,92
6. Net (Expor Impor)	-4.771,40	-4.093,40	-3.820,60	-2.405,96	-1.747,25
<b>TOTAL PDRB</b>	<b>28.538,99</b>	<b>30.320,21</b>	<b>32.039,32</b>	<b>31.790,8</b>	<b>32.897,5</b>

\*Angka Sementara

\*\*Angka sangat sementara

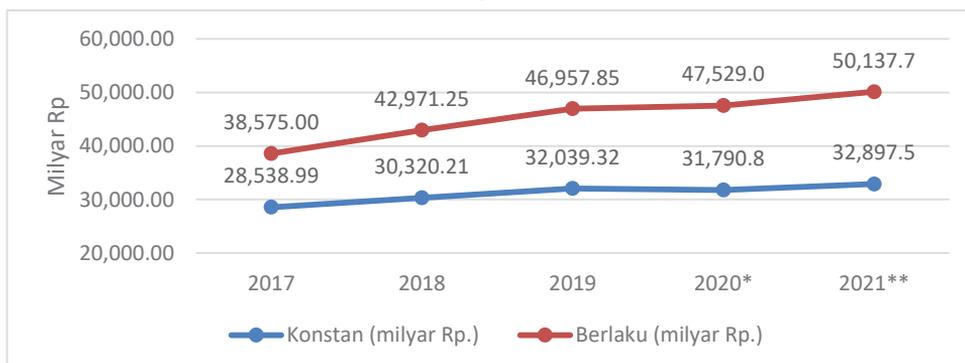
Dari tabel 2, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Konstan di Kabupaten Cianjur meningkat, yakni sebesar 28.538,99 miliar Rupiah (2017) , 30.320,21 miliar Rupiah (2018) dan 32.039,32 miliar Rupiah (2019) dan 31.790,8 miliar Rupiah (2020) dan 32.897,5 miliar Rupiah (2021) . Sedangkan dari grafik 2, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cianjur tahun 2021 mengalami peningkatan laju pertumbuhan, yakni dari -0,78 persen pada tahun 2020 menjadi 3,48 persen pada tahun 2021.

**Grafik 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran, Kabupaten Cianjur, Tahun 2017-2021**



Dari grafik 3, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB atas dasar harga Konstan. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat. Sedangkan pada PDRB atas dasar harga Konstan, pengaruh dari harga tersebut telah diiadakan. Sama halnya dengan PDRB atas dasar harga Berlaku, sebagian besar pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga Konstan tahun 2017 sampai 2019 juga menunjukkan peningkatan. Terjadi penurunan pada tahun 2020 karena dampak pandemi covid-19. Dan meningkat kembali pada tahun 2021 sejalan dengan mulai pulihnya ekonomi pasca pandemi.

**Grafik 3. Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Cianjur, Tahun 2017-2021**



Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor dikurangi impor barang dan jasa.

**Tabel 3. Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Cianjur, Tahun 2017-2021**

(Persen)

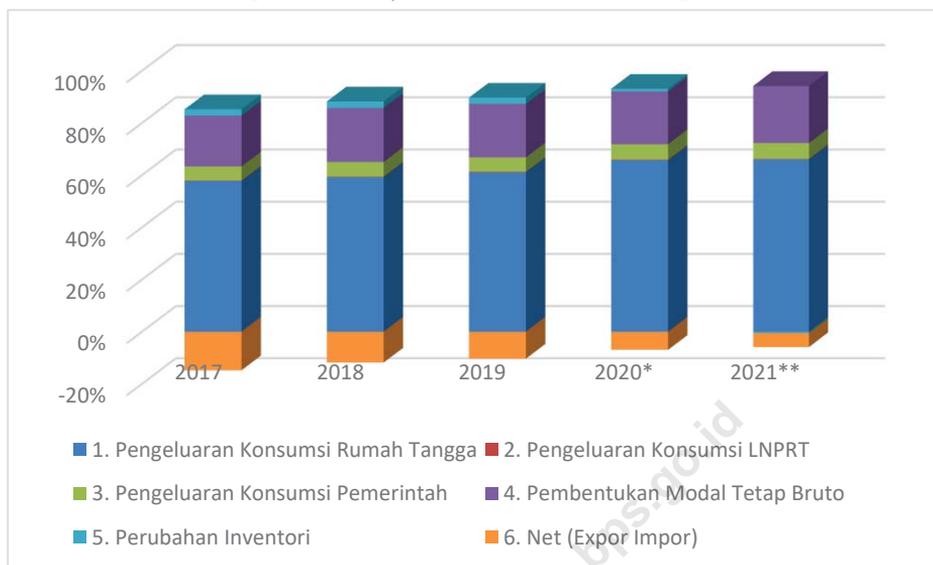
Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	81,94	77,45	76,90	76,22	74,75
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,22	0,25	0,24	0,24	0,23
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,67	7,36	6,99	6,89	6,87
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	27,67	27,08	25,80	23,45	24,75
5. Perubahan Inventori	3,40	3,22	3,00	1,17	-0,55
6. Net (Expor Impor)	-20,90	-15,35	-12,93	-7,97	-6,05
<b>TOTAL PDRB</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

\*Angka Sementara

\*\*Angka sangat sementara

Dari tabel 3 terlihat bahwa selama periode 2017-2021, PDRB Kabupaten Cianjur, sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT). Pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar, yakni sekitar 23 s/d 28 persen. Di sisi lain komponen net ekspor sebagai komponen pengurang dalam PDRB juga masih berkontribusi relatif besar, yakni sekitar 8 s.d 21 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah atau bahkan luar negeri (impor).

**Grafik 4. Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Cianjur, Tahun 2017-2021 (persen)**



Kontribusi komponen konsumsi pemerintah (PK-P) berada pada rentang 6 – 8 persen. Hal tersebut menunjukkan peran pemerintah dalam menyerap PDRB Kabupaten Cianjur berada di urutan ke empat.

**Tabel 4. Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Cianjur, Tahun 2017-2021**

(Persen)

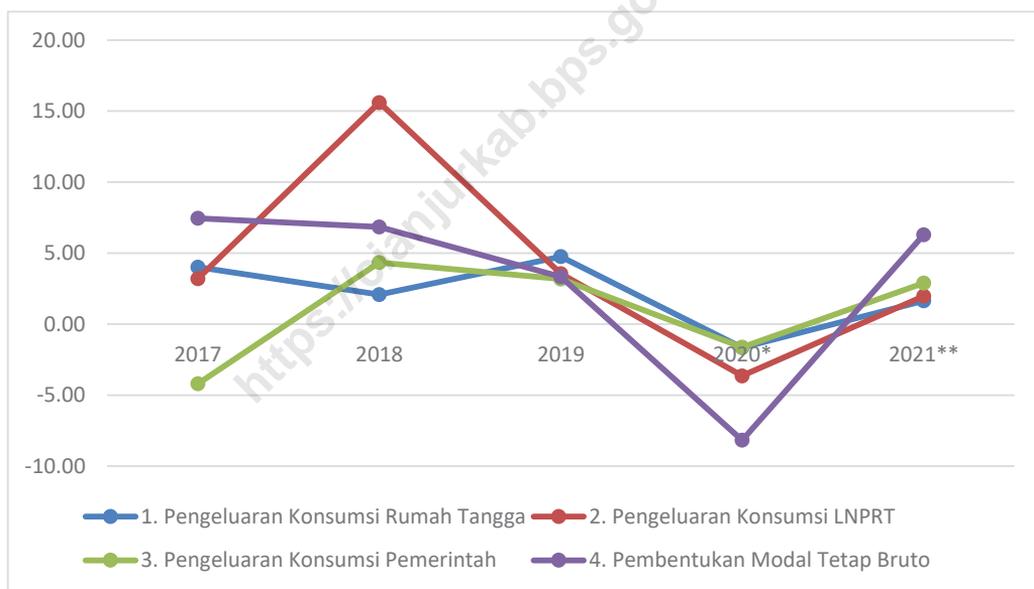
Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,02	2,08	4,75	-1,65	1,64
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3,19	15,61	3,54	-3,64	1,96
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-4,20	4,34	3,17	-1,62	2,90
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	7,45	6,85	3,32	-8,18	6,30
5. Perubahan Inventori	0,75	1,00	0,21	-60,59	-147,06
6. Net (Expor Impor)	-4,18	-14,21	-6,66	-37,03	-27,38
<b>TOTAL PDRB</b>	<b>5,77</b>	<b>6,24</b>	<b>5,67</b>	<b>-0,78</b>	<b>3,48</b>

\*Angka Sementara

\*\*Angka sangat sementara

Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sebagaimana terlihat dari tabel 4, selama periode tahun 2017-2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cianjur mengalami fluktuasi dan mengalami kontraksi pada tahun 2020, secara berturut-turut yakni 5,77 persen (2017) 6,24 persen (2018); 5,67 persen (2019) -0,78 persen (2020) dan 3,48 persen (2021). Sedangkan dari grafik 5 akan terlihat pertumbuhan masing-masing komponen PDRB selama periode tahun yang sama.

**Grafik 5. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Cianjur Tahun 2017-2021 (persen)**



Indeks implisit PDRB pengeluaran menggambarkan besarnya perubahan harga yang terjadi dari sisi konsumen akhir barang dan jasa (rumah tangga, LNPRT, pemerintah, dan perusahaan), baik yang digunakan untuk keperluan konsumsi, investasi maupun ekspor/impor. Dari tabel 5 terlihat tingkat kenaikan harga selama periode tahun 2017-2021, baik perubahan harga yang terjadi secara umum maupun pada masing-masing komponen.

**Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran  
Kabupaten Cianjur, Tahun 2017-2021**

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	138,63	143,00	148,12	151,10	153,78
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	132,15	141,97	146,84	148,96	150,83
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	163,55	167,55	168,57	171,13	174,87
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	137,11	139,90	140,96	141,21	147,95
5. Perubahan Inventori	154,13	160,59	163,17	163,99	173,91
6. Net (Expor Impor)	168,99	161,13	158,87	157,41	173,49
<b>TOTAL PDRB</b>	<b>135,17</b>	<b>141,72</b>	<b>146,56</b>	<b>149,51</b>	<b>152,41</b>

\*Angka Sementara

\*\*Angka sangat sementara

**Tabel 6. Sumber Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran  
Kabupaten Cianjur, Tahun 2017-2021**

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,26	1,66	3,65	-1,26	1,24
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,01	0,04	0,01	-0,01	0,00
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-0,29	0,27	0,20	-0,10	0,17
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2,00	1,87	0,91	-2,19	1,56
5. Perubahan Inventori	0,02	0,03	0,01	-1,63	-1,57
6. Net (Expor Impor)	0,77	2,38	0,90	4,42	2,07
<b>TOTAL PDRB</b>	<b>5,77</b>	<b>6,24</b>	<b>5,67</b>	<b>-0,78</b>	<b>3,48</b>

\*Angka Sementara

\*\*Angka sangat sementara

## 3.2. PERKEMBANGAN KOMPONEN PDRB PENGELUARAN

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari upaya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu, tidak terlepas dari perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumahtangga, LNPRT dan pemerintah, sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori. Berikut perilaku masing-masing komponen PDRB pengeluaran Kabupaten Cianjur untuk periode 2017-2021.

### 3.2.1. Konsumsi Akhir Rumahtangga

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kabupaten Cianjur, ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumahtangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Cianjur maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumahtangga.

Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumahtangga adalah sebagai konsumen akhir (*final consumer*) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumahtangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain-lain). Selanjutnya, berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklasifikasikan menurut 7 (tujuh) kelompok COICOP (*Classification of Individual Consumption by Purpose*), yaitu kelompok makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan

dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; angkutan dan komunikasi; restoran dan hotel; serta kelompok barang dan jasa lainnya.

Data berikut menunjukkan bahwa pada periode tahun 2017-2021 pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga mengalami peningkatan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumahtangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Selama periode 2017-2021 proporsi pengeluaran konsumsi rumahtangga terhadap total PDRB cenderung menurun, 81,94 persen (2017) 77,45 persen (2018) 76,90 persen (2019) 76,22 persen (2020) dan 74,75 (2021). Posisi tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 81,94 persen dan terendah pada tahun 2021 sebesar 74,75 persen. Secara umum dalam periode 2017-2021, komponen konsumsi rumah tangga cenderung mengalami penurunan proporsi terhadap PDRB setiap tahunnya. Walaupun secara nominal nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga mengalami kenaikan, namun peranannya terhadap total PDRB relatif stabil di kisaran 74 hingga 82 persen, hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan nilai nominal yang terjadi pada komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga juga dialami oleh komponen pengeluaran lain. Sehingga penambahan nilai nominal yang terjadi tidak berdampak signifikan pada pergeseran distribusi (proporsi).

**Tabel 7. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Cianjur, Tahun 2017-2021**

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga</b>					
Atas Dasar Harga Berlaku (miliar Rp)	31.607,52	33.280,74	36.111,19	36.226,78	37.476,11
Atas Dasar Harga konstan 2010 (miliar Rp)	22.800,30	23.273,51	24.379,02	23.975,67	24.369,71
Proporsi terhadap PDRB atas Dasar Harga Berlaku (%)	81,94	77,45	76,90	76,22	74,75
<b>Rata-rata konsumsi Rumah Tangga per kapita per tahun</b>					
Atas Dasar Harga Berlaku (Ribu Rp)	14.006,77	14.721,95	15.666,79	14.663,81	14.950,48
Atas Dasar Harga konstan 2010 (Ribu Rp)	10.103,88	10.295,19	10.576,80	9.704,83	9.721,90
<b>Pertumbuhan</b>					
Konsumsi Rumah Tangga Atas dasar Harga Berlaku (%)	7,34	5,29	8,50	0,32	3,45
Konsumsi Rumah Tangga Atas dasar Harga Konstat (%)	4,02	2,08	4,75	-1,65	1,64
Konsumsi Rumah Tangga Perkapita atas Dasar Harga Konstan (%)	3,76	1,89	2,74	-8,24	0,18
Jumlah Penduduk	2.256.589	2.260.620	2.304.952	2.470.489	2.506.682

\*Angka Sementara

\*\*Angka sangat sementara

Pada masa pemulihan ekonomi, biasanya institusi rumahtangga memperbaiki perilaku atau pola konsumsinya. Hal tersebut terjadi karena secara umum tingkat pendapatan masyarakat akan naik dan di sisi lain persediaan atau penawaran berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik bertambah. Kondisi semacam ini memicu naiknya belanja untuk keperluan konsumsi, termasuk konsumsi rumahtangga.

Secara rata-rata, konsumsi per kapita dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik menurut atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Menurun pada tahun 2020 karena imbas pandemi covid-19. Pada tahun 2017, per orang (kapita) ADHB di Kabupaten Cianjur menghabiskan dana sekitar 14 juta rupiah setahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Pengeluaran tersebut meningkat menjadi 14,72 juta rupiah (2018); 15,67 juta Rupiah (2019); 14,67 juta Rupiah (2020) dan 14,95 juta Rupiah (2021).

Pada tahun 2017 atas dasar harga berlaku 2010, pertumbuhan komponen konsumsi rumahtangga sebesar 7,34 persen. Kemudian, berturut-turut sebesar

5,29 persen (2018); 8,50 persen (2019); 0,32 persen (2020) dan 3,45 persen (2021). Sementara itu atas dasar harga konstan 2010, rata-rata pertumbuhan konsumsi per-kapita pada masing-masing tahun adalah 4,02 persen (2017); 2,08 persen (2018) 4,75 persen (2019) -1,65 persen (2020) dan 1,64 persen (2021). Dari data tersebut nampak bahwa peningkatan total konsumsi “riil” rumahtangga lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk yang berada pada kisaran 1 persen. Hal ini mengindikasikan telah terjadi perbaikan pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, rata-rata konsumsi per-kapita cenderung naik, searah dengan pertambahan jumlah penduduk. Kondisi ini menunjukkan rata-rata konsumsi setiap penduduk meningkat, baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai (termasuk peningkatan kualitas). Rata-rata konsumsi per-kapita secara “riil” meningkat pada kisaran -8,24 s.d. 3,76 persen dalam kurun waktu 2017-2021 dan terjadi penurunan pada tahun 2020.

**Tabel 8. Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Cianjur, Tahun 2017-2021 (Persen)**

Kelompok Konsumsi	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a Makanan, Minuman, dan Rokok	51,08	50,56	51,35	52,67	53,12
b Pakaian dan Alas Kaki	6,44	6,57	6,57	6,25	6,17
c Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	12,52	12,41	11,95	11,98	11,67
d Kesehatan & Pendidikan	5,52	5,60	5,61	5,79	5,88
e Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	18,71	19,00	18,74	17,55	17,43
f Hotel & Restoran	2,67	2,74	2,69	2,65	2,63
g Lainnya	3,06	3,12	3,09	3,11	3,09
<b>Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

\*Angka Sementara

\*\*Angka sangat sementara

Sementara itu, tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam Tabel 9, menunjukkan peningkatan setiap tahunnya untuk masing-masing kelompok pengeluaran konsumsi rumah tangga. Peningkatan harga relatif tinggi

terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 3,58 persen, pada komponen PKRT. Hal ini diakibatkan oleh tingginya perubahan harga/tarif makanan minuman dan rokok di periode tersebut.

**Tabel 9. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Cianjur, Tahun 2017-2021 (persen)**

Kelompok Konsumsi	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a Makanan, Minuman, dan Rokok	3,10	3,69	3,68	2,20	2,05
b Pakaian dan Alas Kaki	2,94	3,27	4,66	2,15	1,23
c Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	3,70	2,04	2,45	1,35	1,16
d Kesehatan & Pendidikan	2,18	3,33	4,68	2,12	0,23
e Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	3,29	2,97	2,73	0,05	1,65
f Hotel & Restoran	2,52	3,54	2,18	2,30	1,72
g Lainnya	2,43	4,19	4,38	3,66	2,52
<b>Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga</b>	<b>3,20</b>	<b>3,15</b>	<b>3,58</b>	<b>2,01</b>	<b>1,78</b>

\*Angka Sementara

\*\*Angka sangat sementara

### 3.2.2. Konsumsi Akhir LNPRT

Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) adalah salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Dalam kegiatannya, LNPRT merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan hidup.

**Tabel 10. Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT  
Kabupaten Cianjur, Tahun 2017-2021**

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Konsumsi LNPRT</b>					
Atas Dasar Harga Berlaku	86,01	106,83	114,40	111,84	115,46
Atas Dasar Harga Konstan 2010	65,09	75,25	77,91	75,08	76,55
Proporsi terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	0,22	0,25	0,24	0,24	0,23
Pertumbuhan ADHK 2010 (%)	3,19	15,61	3,54	-3,64	1,96

\*Angka Sementara

\*\*Angka sangat sementara

Total pengeluaran konsumsi LNPRT dalam kurun waktu tahun 2017-2021 secara umum mengalami peningkatan. Terjadi penurunan di tahun 2020 karena dampak pandemi covid-19. Pada tahun 2017 konsumsi LNPRT sebesar 86,01 miliar rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya; 106,83 miliar rupiah (2018), 114,40 miliar rupiah (2019) 111,84 miliar rupiah (2020) dan 115,46 miliar rupiah (2021). Pertumbuhan pengeluaran konsumsi LNPRT tahun dasar 2010 juga berturut-turut adalah 3,19 persen (2017) 15,61 persen (2018) 3,54 persen (2019) - 3,64 persen (2020) dan 1,96 persen (2021). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 karena pengaruh dari masa tahapan pemilihan umum di tahun tersebut, yang berdampak pada pengeluaran ekstra dari berbagai LNPRT, khususnya partai politik dan afiliasinya. Sementara itu pemilihan kepala daerah yang terjadi pada bulan Desember 2020 digelar dalam situasi pandemi covid-19 dimana masih ada kebijakan pembatasan pergerakan aktivitas masyarakat dan kegiatan sosial.

### 3.2.3. Konsumsi Akhir Pemerintah

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah. b) *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga). c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri.

Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) *Non rivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian.

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik untuk atas dasar harga Berlaku maupun atas dasar harga Konstan 2010. Pada tahun 2017 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga Berlaku sebesar 2.897 miliar rupiah, kemudian meningkat terus hingga pada tahun 2020 nilainya mencapai 3.307 miliar rupiah. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga Konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

**Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Cianjur, Tahun 2017-2021**

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Konsumsi Pemerintah</b>					
Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rp)	2.956,90	3.160,55	3.280,70	3.276,76	3.445,38
Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rp)	1.807,94	1.886,35	1.946,24	1.914,72	1.970,20
Proporsi terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (%)	7,67	7,36	6,99	6,89	6,87
<b>Konsumsi Pemerintah perkapita (ribu Rp.)</b>					
Atas Dasar Harga Berlaku (ribu Rp)	1.310	1.398	1.423	1.326	1.374
Atas Dasar Harga Konstan 2010 (ribu Rp)	801	834	844	775	786
<b>Pertumbuhan (%)</b>					
Total Konsumsi Pemerintah ADHK	-4,20	4,34	3,17	-1,62	2,90
Perkapita ADHK	-4,44	4,15	1,19	-8,21	1,41
Jumlah penduduk	2.256.589	2.260.620	2.304.952	2.470.489	2.506.682

\*Angka Sementara

\*\*Angka sangat sementara

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB juga mengalami fluktuasi. Sepanjang periode tersebut, proporsi terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar 6,87 persen; sedangkan proporsi tertinggi pada tahun 2017 yang mencapai 7,67 persen.

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan jasa layanan pada publik atau masyarakat dalam bentuk jasa kolektif maupun individual. Dalam praktek, pengeluaran pemerintah ini selalu dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik), meskipun tidak seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita. Pada tahun

2017 konsumsi pemerintah per-kapita atas dasar harga berlaku sebesar 1,31 juta rupiah, terus meningkat pada tahun-tahun setelah itu, yaitu menjadi 1,39 juta rupiah (2018); 1,42 juta rupiah (2019); 1,32 juta rupiah (2020) dan mencapai 1,37 juta rupiah pada tahun 2021. Di tahun 2018 diperoleh data konsumsi pemerintah di kelompok pegawai provinsi dan pusat secara lebih rinci untuk periode 2017-2018 sehingga dilakukan perbaikan nilai di periode tersebut.

Rata-rata konsumsi pemerintah atas dasar harga Konstan (2010) juga menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya (lihat tabel 11), dengan masing-masing senilai 801 juta rupiah (2017); 834 juta rupiah (2018); 844 juta rupiah (2019); 775 juta rupiah (2020) dan 786 juta rupiah (2021). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pengeluaran konsumsi pemerintah secara kuantitas, dengan laju pertumbuhan sebesar -4,20 persen (2017) dan menjadi negative 4,34 persen (2018). Kemudian pada tahun berikutnya pertumbuhan konsumsi pemerintah per kapita bernilai 3,17persen (2019); -1,62 persen (2020) dan 2,90 persen (2021).

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara “riil” menunjukkan peningkatan baik secara keseluruhan maupun rata-rata. Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas pengeluaran sumber daya finansial oleh pemerintah. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018, dengan rincian untuk total konsumsi pemerintah sebesar 4,34 persen; dan dengan pertumbuhan konsumsi per-kapita 4,15 persen.

#### **3.2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto**

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi

pada berbagai Pengeluaran. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

**Tabel 12. Perkembangan dan Struktur PMTB  
Kabupaten Cianjur, Tahun 2017-2021**

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>PMTB</b>					
Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rp)	10.674,53	11.637,13	12.114,61	11.143,62	12.410,21
Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rp)	7.785,15	8.318,08	8.594,51	7.891,46	8.388,23
Proporsi terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (%)	27,67	27,08	25,80	23,45	24,75
<b>Struktur PMTB (ADHB) (%)</b>					
Bangunan (%)	81,27	81,85	82,72	84,23	84,02
Non Bangunan (%)	18,73	18,15	17,28	15,77	15,98
Total PMTB (%)	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
<b>Pertumbuhan (%) (ADHK)</b>					
Bangunan (%)	7,45	6,85	3,32	-8,18	6,30
Non Bangunan (%)	8,36	7,87	4,60	-6,56	5,75
	3,25	1,88	-3,18	-17,13	9,66

\*Angka Sementara

\*\*Angka sangat sementara

Pengelompokan PMTB pada PDRB tahun dasar 2010 dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Bangunan dan Non Bangunan. Data di tabel 12 mencatat bahwa, secara keseluruhan pertumbuhan PMTB atas dasar harga konstan 2010 dalam kurun waktu 2017-2021 mengalami fluktuasi bahkan kontraksi dari 3,32 persen (2019) menjadi -8,18 persen (2020) sebagai dampak pandemi covid-19, sementara di tahun lainnya masing-masing 7,45 persen (2017) 6,85 persen (2018), dan 6,30 (2021). Pertumbuhan PMTB tertinggi terjadi pada Tahun 2017, hal ini disebabkan oleh meningkatnya konsumsi yang digunakan untuk PMTB sejalan dengan penambahan pembangunan fisik di wilayah Kabupaten Cianjur.

### 3.2.5. Perubahan Inventori

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “**persediaan**” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

**Tabel 13. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Cianjur, Tahun 2017-2021**

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Perubahan Inventori</b>					
Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rp)	1.313,07	1.381,79	1.406,89	557,24	-278,12
Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rp)	851,93	860,42	862,24	339,80	-159,92
Proporsi terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (%)	3,40	3,22	3,00	1,17	-0,55

\*Angka Sementara

\*\*Angka sangat sementara

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih jauh sebagaimana dilakukan pada

komponen pengeluaran lainnya.. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah, bahwa proporsi dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

Pada Tahun 2017 perubahan inventori atas dasar harga berlaku sebesar 1.313,07 miliar rupiah, yang kemudian meningkat pada tahun 2018 menjadi 1.381,79 miliar rupiah, sementara di tahun 2019 sebesar 1.406,89 miliar rupiah serta di tahun 2020 sebesar 557,24 miliar rupiah. Sementara di tahun 2021 terjadi penurunan menjadi -278,12 miliar rupiah.

Sementara itu, proporsi perubahan inventori terhadap total PDRB di Kabupaten Cianjur mengalami penurunan dalam periode 5 tahun terakhir. Pada tahun 2016 proporsi perubahan inventori adalah 3,40 persen (2017), 3,22 persen (2018), 3,00 persen (2019), 1,17 persen (2020) dan -0,55 (2021) . Proporsi perubahan inventori tertinggi terdapat pada tahun 2017.

### **3.2.6. Net Ekspor Barang dan Jasa**

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kabupaten Cianjur, tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kabupaten lain di dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

**Tabel 14. Perkembangan dan Struktur Net Ekspor Kabupaten Cianjur, Tahun 2017-2021**

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Net (Ekspor-Impor)</b>					
Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rp)	-8.063,03	-6.595,80	-6.069,94	-3.787,27	-3.031,39
Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rp)	-4.771,40	-4.093,40	-3.820,60	-2.405,96	-1.747,25
Proporsi terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (%)	-20,90	-15,35	-12,93	-7,97	-6,05

\*Angka Sementara

\*\*Angka sangat sementara

Secara total, dalam kurun waktu 2017-2021 nilai Net (Ekspor-Impor) barang dan jasa cenderung menunjukkan peningkatan setiap tahun. Nilai net ekspor yang bertanda negatif mengandung makna bahwa yang terjadi pada Kabupaten Cianjur adalah nilai impor barang dan jasa lebih besar daripada nilai ekspor sehingga terjadi impor. Pada tahun 2017 atas dasar harga berlaku, nilai net impor barang dan jasa sebesar 8.063,03 miliar rupiah, 6.595,80 miliar rupiah (2018); 6.069,94 miliar rupiah (2019); 3.787,27 miliar rupiah (2020) dan 3.031,39 miliar rupiah (2021). Sejalan dengan nilai net impor atas dasar harga Berlaku, nilai net impor barang dan jasa atas dasar harga konstan 2010 juga menunjukkan pola yang cenderung meningkat. Nilai net impor Kabupaten Cianjur pada periode 2017-2021, masing-masing tahun sebesar 4.771,40 miliar rupiah (2017); 4.093,40 miliar rupiah (2018); 3.820,60 miliar rupiah (2019); 2.405,96 miliar rupiah (2020) dan 1.747,25 miliar rupiah (2021). Sementara itu, pada periode 2017 s.d 2021, proporsi dalam PDRB juga bergerak membaik, dari teredah -20,90 persen di tahun 2017 hingga tertinggi -6,05 persen di tahun 2021.

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Kabupaten Cianjur

Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

<https://cianjurkab.bps.go.id>

## ***BAB IV***

# ***PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB PENGELUARAN KABUPATEN CIANJUR 2017 - 2021***

<https://cianjurkab.bps.go.id>



Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

#### 4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, maka disajikan data PDRB perkapita

**Tabel 15. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Cianjur, Tahun 2017-2021**

Uraian	2017	2018	2019	2020 *	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB ADHB (miliar)	38.575,00	42.971,25	46.957,85	47.528,97	50.137,65
PDRB ADHK (miliar)	28.538,99	30.320,21	32.039,32	31.790,76	32.897,52
ADHB perkapita (ribu)	17.094	19.009	20.373	19.239	20.002
ADHK perkapita (ribu)	12.647	13.412	13.900	12.868	13.124
Pertumbuh ADHK perkapita (%)	4,62	6,05	3,64	-7,42	1,99
Jml. Penduduk	2.256.589	2.260.620	2.304.952	2.470.489	2.506.682

\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

PDRB per kapita Kabupaten Cianjur menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (tabel 15), seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Kecuali tahun 2020 mengalami penurunan sebagai dampak pandemi covid-19. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kabupaten Cianjur rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai per kapita di masing-masing tahun tersebut.

Sementara itu pertumbuhan per-kapita secara “riil” mengalami pertumbuhan dari tahun 2017 hingga 2019 dan mengalami penurunan di tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk, yang menunjukkan pola perlambatan kecepatan pertumbuhan, dengan rata-rata pada kisaran kurang dari 1 persen setiap tahunnya.

#### **4.2 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB**

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap). Sekilas nampak bahwa sebagian besar penggunaan produk yang tersedia di wilayah domestik Kabupaten Cianjur digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

Angka rasio perbandingan antara konsumsi rumah tangga (RT) dengan PMTB menggambarkan besarnya pemakaian PDRB Kabupaten Cianjur untuk konsumsi (RT) dan investasi (PMTB). Semakin kecil rasionya berarti bahwa PDRB Kabupaten Cianjur semakin banyak dipakai untuk investasi sehingga akan memicu pertumbuhan ekonomi menjadi lebih cepat.

**Tabel 16. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB  
Tahun 2017-2021**

<b>Komponen Pengeluaran</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020 *</b>	<b>2021**</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>
Konsumsi Rumah Tangga (ADHB)	31.607,52	33.280,74	36.111,19	36.226,78	37.476,11
PMTB (ADHB)	10.674,53	11.637,13	12.114,61	11.143,62	12.410,21
Perbandingan Konsumsi RT thd PMTB	2,96	2,86	2,98	3,25	3,02

\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Angka rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB relatif berfluktuatif, dari sebesar 2,96 pada Tahun 2017 turun menjadi 2,86 pada tahun 2018. Pada tahun 2019-2020 memiliki rasio masing-masing sebesar 2,98 dan 3,25, sedangkan di tahun 2021 menjadi 3,02. Secara umum nilai rasio konsumsi RT terhadap investasi di Kabupaten Cianjur relatif tinggi, dengan pola yang berfluktuatif mengindikasikan bahwa pertumbuhan nilai investasi di Kabupaten Cianjur bergerak masih rendah dibanding pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Di Tahun 2020 rasio konsumsi RT terhadap PMTB sebesar 3,25, maknanya adalah penggunaan PDRB Kabupaten Cianjur untuk konsumsi rumah tangga 3 kali lebih besar dibanding penggunaannya untuk investasi.

#### **4.3 PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB**

Konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

**Tabel 17. Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB  
Kabupaten Cianjur, Tahun 2017 - 2021 (Milyar)**

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020 *	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Rumah Tangga (ADHB)	31.607,52	33.280,74	36.111,19	36.226,78	37.476,11
Konsumsi LNPRT (ADHB)	86,01	106,83	114,40	111,84	115,46
Konsumsi Pemerintah (ADHB)	2.956,90	3.160,55	3.280,70	3.276,76	3.445,38
Jumlah	34.650,43	36.548,12	39.506,30	39.615,37	41.036,95
PDRB ADHB	38.575,00	42.971,25	46.957,85	47.528,97	50.137,65
Proporsi (%)	89,83	85,05	84,13	83,35	81,85

\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

Pada Tahun 2017-2021 sebagian besar barang dan jasa yang berada di wilayah domestik digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (lebih dari 80 persen). Konsumsi akhir makin meningkat setiap tahunnya, sementara proporsinya terhadap PDRB relatif turun. Peningkatan nilai konsumsi akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup manusia yang tercermin dari meningkatnya angka IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Penurunan proporsi konsumsi akhir mengindikasikan penggunaan produk Kabupaten Cianjur yang tidak digunakan menjadi konsumsi akhir (berupa PMTB atau ekspor) memiliki peran yang semakin besar, meskipun masih dalam skala yang relatif kecil.

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah". Saat kondisi ekonomi berkontraksi akibat pandemi output tidak terlalu dipengaruhi oleh barang modal yang ada tetapi oleh kemampuan pasar dalam menyerap output yang dihasilkan. Saat daya beli masyarakat menurun maka produsen cenderung membatasi produksi mereka.

***BAB V***

***PENUTUP***

<https://cianjurkab.bps.go.id>



1. PDRB menurut penggunaan tahun 2017 s.d 2021 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Cianjur pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi Pengeluaran (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2017 s.d 2021, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia.



# **LAMPIRAN**

<https://cianjurkab.bps.go.id>



**Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku  
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Cianjur  
Tahun 2017-2021**

*(Juta Rupiah)*

KOMPONEN PENGELUARAN	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	<b>31.607.518,92</b>	<b>33.280.740,79</b>	<b>36.111.187,89</b>	<b>36.226.777,00</b>	<b>37.476.108,62</b>
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	16.144.079,44	16.825.690,35	18.543.496,40	19.081.893,28	19.907.498,81
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	2.035.425,40	2.186.801,83	2.373.803,83	2.263.191,48	2.313.608,04
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	3.957.517,73	4.131.646,98	4.315.707,80	4.338.611,27	4.374.166,54
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	1.744.196,97	1.862.759,25	2.025.220,08	2.097.256,58	2.204.603,57
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	5.915.173,81	6.323.089,92	6.767.194,75	6.357.454,57	6.533.307,73
1.f. Hotel dan Restoran	844.005,89	911.279,03	970.811,68	961.127,10	985.149,17
1.g. Lainnya	967.119,69	1.039.473,44	1.114.953,36	1.127.242,72	1.157.774,76
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	<b>86.012,34</b>	<b>106.828,03</b>	<b>114.404,15</b>	<b>111.836,00</b>	<b>115.462,36</b>
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	<b>2.956.900,37</b>	<b>3.160.552,88</b>	<b>3.280.704,13</b>	<b>3.276.756,44</b>	<b>3.445.376,86</b>
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	<b>10.674.531,59</b>	<b>11.637.133,37</b>	<b>12.114.610,09</b>	<b>11.143.620,56</b>	<b>12.410.211,81</b>
4.a. Bangunan	8.675.197,16	9.525.036,11	10.021.554,63	9.385.817,27	10.426.551,60
4.b. Non Bangunan	1.999.334,43	2.112.097,26	2.093.055,46	1.757.803,28	1.983.660,21
5. Perubahan Inventori	<b>1.313.068,44</b>	<b>1.381.794,36</b>	<b>1.406.889,44</b>	<b>557.243,06</b>	<b>-278.118,81</b>
6. Net Ekspor Impor Antar Daerah	<b>-8.063.030,26</b>	<b>-6.595.804,02</b>	<b>-6.069.940,80</b>	<b>-3.787.266,38</b>	<b>-3.031.389,19</b>
<b>PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)</b>	<b>38.575.001,40</b>	<b>42.971.245,40</b>	<b>46.957.854,90</b>	<b>47.528.966,7</b>	<b>50.137.651,6</b>

<sup>R</sup> Angka Perbaikan

\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

**Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan  
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Cianjur  
Tahun 2017-2021**

*(Juta Rupiah)*

KOMPONEN PENGELUARAN	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	<b>22.800.298,72</b>	<b>23.273.506,56</b>	<b>24.379.021,88</b>	<b>23.975.666,98</b>	<b>24.369.708,86</b>
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	10.523.666,81	10.577.974,93	11.244.353,65	11.321.453,56	11.574.191,89
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	1.706.269,51	1.775.157,88	1.841.221,95	1.718.485,23	1.735.361,10
1.c. Perumahan, Perkakas, P erengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	3.007.068,29	3.076.710,40	3.137.020,28	3.111.739,50	3.101.314,85
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	1.420.124,99	1.467.730,30	1.524.334,44	1.545.768,70	1.621.192,76
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	4.686.130,71	4.864.750,75	5.067.901,54	4.758.556,17	4.810.791,49
1.f. Hotel dan Restoran	722.149,48	753.043,12	785.122,76	759.843,75	765.648,35
1.g. Lainnya	734.888,93	758.139,18	779.067,26	759.820,08	761.208,42
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	<b>65.085,94</b>	<b>75.247,18</b>	<b>77.911,27</b>	<b>75.076,07</b>	<b>76.550,56</b>
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	<b>1.807.940,82</b>	<b>1.886.351,43</b>	<b>1.946.241,27</b>	<b>1.914.722,30</b>	<b>1.970.197,61</b>
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	<b>7.785.145,54</b>	<b>8.318.080,46</b>	<b>8.594.507,01</b>	<b>7.891.458,37</b>	<b>8.388.229,28</b>
4.a. Bangunan	6.448.697,82	6.956.454,19	7.276.238,12	6.798.943,31	7.190.154,51
4.b. Non Bangunan	1.336.447,72	1.361.626,27	1.318.268,90	1.092.515,06	1.198.074,77
5. Perubahan Inventori	<b>851.926,79</b>	<b>860.423,36</b>	<b>862.238,28</b>	<b>339.797,85</b>	<b>-159.920,47</b>
6. Net Ekspor Impor Antar Daerah	<b>-4.771.404,18</b>	<b>-4.093.403,36</b>	<b>-3.820.602,02</b>	<b>-2.405.963,12</b>	<b>-1.747.248,80</b>
<b>PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 )</b>	<b>28.538.993,62</b>	<b>30.320.205,61</b>	<b>32.039.317,70</b>	<b>31.790.758,4</b>	<b>32.897.517,0</b>

<sup>R</sup> Angka Perbaikan

\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

**Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Seri Kabupaten Cianjur Tahun 2017-2021**

(Persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	81,94	77,45	76,90	76,22	74,75
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	41,85	39,16	39,49	40,15	39,71
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	5,28	5,09	5,06	4,76	4,61
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	10,26	9,61	9,19	9,13	8,72
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	4,52	4,33	4,31	4,41	4,40
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	15,33	14,71	14,41	13,38	13,03
1.f. Hotel dan Restoran	2,19	2,12	2,07	2,02	1,96
1.g. Lainnya	2,51	2,42	2,37	2,37	2,31
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,22	0,25	0,24	0,24	0,23
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,67	7,36	6,99	6,89	6,87
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	27,67	27,08	25,80	23,45	24,75
4.a. Bangunan	22,49	22,17	21,34	19,75	20,80
4.b. Non Bangunan	5,18	4,92	4,46	3,70	3,96
5. Perubahan Inventori	3,40	3,22	3,00	1,17	-0,55
6. Net Ekspor Impor Antar Daerah	-20,90	-15,35	-12,93	-7,97	-6,05
<b>PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

<sup>R</sup> Angka Perbaikan

\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

**Tabel 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Seri  
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Cianjur  
Tahun 2017-2021**

*(Persen)*

KOMPONEN PENGELUARAN	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	<b>4,02</b>	<b>2,08</b>	<b>4,75</b>	<b>-1,65</b>	<b>1,64</b>
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	5,07	0,52	6,30	0,69	2,23
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	3,12	4,04	3,72	-6,67	0,98
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	2,32	2,44	0,25	0,07	-2,50
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	2,32	2,41	4,52	1,09	5,47
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	3,78	3,81	4,18	-6,10	1,10
1.f. Hotel dan Restoran	4,77	4,28	4,26	-3,22	0,76
1.g. Lainnya	3,53	3,16	2,76	-2,47	0,18
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	<b>3,19</b>	<b>15,61</b>	<b>3,54</b>	<b>-3,64</b>	<b>1,96</b>
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	<b>-4,20</b>	<b>4,34</b>	<b>3,17</b>	<b>-1,62</b>	<b>2,90</b>
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	<b>7,45</b>	<b>6,85</b>	<b>3,32</b>	<b>-8,18</b>	<b>6,30</b>
4.a. Bangunan	8,36	7,87	4,60	-6,56	5,75
4.b. Non Bangunan	3,25	1,88	-3,18	-17,13	9,66
5. Perubahan Inventori <sup>1)</sup>					
6. Net Ekspor Impor Antar Daerah <sup>1)</sup>					
<b>PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)</b>	<b>5,77</b>	<b>6,24</b>	<b>5,67</b>	<b>-0,78</b>	<b>3,48</b>

<sup>R</sup> Angka Perbaikan

\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

1) Laju pertumbuhan tidak ditampilkan

**Tabel 5. Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100)  
Seri, Kabupaten Cianjur  
Tahun 2017-2021**

<b>KOMPONEN PENGELUARAN</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020*</b>	<b>2021**</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	<b>138,63</b>	<b>143,00</b>	<b>148,12</b>	<b>151,10</b>	<b>153,78</b>
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	153,41	159,06	164,91	168,55	172,00
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	119,29	123,19	128,93	131,70	133,32
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	131,61	134,29	137,57	139,43	141,04
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	122,82	126,91	132,86	135,68	135,99
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	126,23	129,98	133,53	133,60	135,81
1.f. Hotel dan Restoran	116,87	121,01	123,65	126,49	128,67
1.g. Lainnya	131,60	137,11	143,11	148,36	152,10
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	<b>132,15</b>	<b>141,97</b>	<b>146,84</b>	<b>148,96</b>	<b>150,83</b>
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	<b>163,55</b>	<b>167,55</b>	<b>168,57</b>	<b>171,13</b>	<b>174,87</b>
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	<b>137,11</b>	<b>139,90</b>	<b>140,96</b>	<b>141,21</b>	<b>147,95</b>
4.a. Bangunan	134,53	136,92	137,73	138,05	145,01
4.b. Non Bangunan	149,60	155,12	158,77	160,90	165,57
5. Perubahan Inventori <sup>1)</sup>					
6. Net Ekspor Impor Antar Daerah <sup>1)</sup>					
<b>PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)</b>	<b>135,17</b>	<b>141,72</b>	<b>146,56</b>	<b>149,51</b>	<b>152,41</b>

<sup>R</sup> Angka Perbaikan

\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

<sup>1)</sup> Indeks implisit tidak ditampilkan

**Tabel 6. Laju Pertumbuhan Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100)  
Seri, Kabupaten Cianjur  
Tahun 2017-2021**

(Persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	3,20	3,15	3,58	2,01	1,78
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	3,10	3,69	3,68	2,20	2,05
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	2,94	3,27	4,66	2,15	1,23
1.c. Perumahan, Perkakas,Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	3,70	2,04	2,45	1,35	1,16
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	2,18	3,33	4,68	2,12	0,23
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi & Budaya	3,29	2,97	2,73	0,05	1,65
1.f. Hotel dan Restoran	2,52	3,54	2,18	2,30	1,72
1.g. Lainnya	2,43	4,19	4,38	3,66	2,52
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3,73	7,43	3,43	1,45	1,25
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,95	2,44	0,61	1,52	2,19
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2,12	2,03	0,75	0,18	4,77
4.a. Bangunan	2,15	1,78	0,59	0,23	5,04
4.b. Non Bangunan	2,40	3,69	2,36	1,34	2,91
5. Perubahan Inventori <sup>1)</sup>					
6. Net Ekspor Impor Antar Daerah <sup>1)</sup>					
<b>PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 )</b>	<b>2,78</b>	<b>4,85</b>	<b>3,41</b>	<b>2,01</b>	<b>1,94</b>

<sup>R</sup> Angka Perbaikan

\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara

<sup>1.</sup> laju pertumbuhan Indeks tidak ditampilkan

## ***DAFTAR PUSTAKA***

<https://cianjurkab.bps.go.id>



1. Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
2. \_\_\_\_\_, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
3. \_\_\_\_\_ *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
4. \_\_\_\_\_, *Profil Ekonomi Rumah tangga 1998*, Jakarta 1999.
5. Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
6. Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, Washington DC, 1979.
7. Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
8. \_\_\_\_\_, *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.
9. \_\_\_\_\_, *Handbook of National Accounting for Production*, Sources and Methods, Series F No. 39, New York, 1986.
10. Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.
11. Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



Badan Pusat Statistik Kabupaten Cianjur  
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Cianjur  
Telp.0263-264762  
Email: bps3203@bps.go.id